



KR-Surya Adi Lesmana

OLAHRAGA DI TAMBAKBOYO: Seorang warga berolahraga lari di kompleks Embung Tambakboyo Depok Sleman. Selain jadi tempat menghirup udara segar di tengah padatnya pemukiman penduduk, saat pagi dan sore hari kawasan ini tak pernah sepi warga yang berolahraga.

MARDIHARTO KEMBALIKAN BERKAS FORMULIR Sekda: Pilur 2021 Lebih Siap

SLEMAN (KR) - Pemilihan lurah (pilur) serentak akan dilaksanakan pada 22 Agustus di 35 kalurahan. Berbagai persiapan juga sudah dilakukan baik jumlah pemilih maupun sistem jemput bola bagi warga yang tidak dapat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kita telah mengevaluasi berbagai masukan terkait pelaksanaan pilihan lurah tahun 2020. Jadi saat ini menjadi lebih siap baik sarana dan prasarannya," ujar Sekda Sleman Harda Kiswaya kepada wartawan, Selasa (8/6).

Terpisah, Ketua Panitia Pemilihan Lurah Tirtoadi Sugianto menjelaskan, sejak mulai dibuka pendaftaran pada 7 Juni, Mardiharto merupakan kandidat kedua yang telah mengembalikan formulir pendaftaran. Sedangkan satu orang yang mengambil formulir belum mengembalikan berkas persyaratan.

"Pendaftaran kita buka mulai 7-17 Juni. Saat ini baru ada 2 yang mengembalikan formulir dan berkas persyaratan. Jadi kita belum dapat mengetahui berapa orang yang akan mengikuti sebagai kontestan," kata Sugianto usai menerima berkas persyaratan dari calon lurah Mardiharto di Balai Kalurahan Tirtoadi, Selasa (8/6).

Sementara Mardiharto usai mengembalikan berkas pendaftaran mengaku siap mengikuti berbagai tahapan pemilihan lurah. Berbagai syarat pun telah dilengkapi dan tidak mengalami kendala. "Niat maju menjadi orang nomor satu di Tirtoadi karena ingin membawa perubahan serta fokus meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadikan kalurahan mandiri," ujar warga Padukuhan Ketingan ini. (Has)-f



KR-Istimewa

Mardiharto menunjukkan visi misi sebagai calon lurah Tirtoadi.

BUTUH ALAT BANTU KESEHATAN BISA KE DINSOS Wabup Danang Serahkan Bantuan Kursi Roda



KR-Istimewa

Danang didampingi Eko Suhargono saat menyerahkan bantuan kursi roda.

SLEMAN (KR) - Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyerahkan bantuan kursi roda kepada warga kurang mampu di Kebonagung Tridadi Sleman. Bantuan tersebut berasal dari program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Dinas Sosial Sleman.

"Ini merupakan wujud kehadiran Pemkab Sleman untuk membantu masyarakat kurang mampu yang tengah mengalami sakit," kata Danang, Selasa (8/6). Bantuan tersebut diserahkan pada sepasang suami-istri, Sutopo dan Sriyati. Pasangan lansia tersebut mengalami penyakit kronis diabetes dan juga katarak, sehingga susah untuk beraktifitas.

Kepala Dinas Sosial Sleman Eko Suhargono menyebutkan, bantuan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan JPS yang telah diajukan oleh pihak keluarga Sutopo dan Sriyati kepada Dinas Sosial Sleman. "JPS ini sifatnya tanggap darurat bagi warga Sleman yang miskin dan rentan miskin," ujarnya. (Has)-f

TERKENDALA JUKLAK JUKNIS PUSAT

Realisasi Penyaluran Anggaran Covid-19 Masih Rendah

SLEMAN (KR) - Realisasi penyaluran dana penanganan Covid-19 dari APBD Sleman tahun 2021 ini terhitung masih sangat rendah. Hal itu tidak lepas dari sikap kehati-hatian Pemkab Sleman untuk pencairan anggaran penanganan Covid-19 sebelum ada juklak dan juknis yang pasti dari pemerintah pusat.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BKAD Sleman Haris Sutarto didampingi Kabid Anggaran BKAD Sleman Aji Wibowo kepada pers di Resto Pepes Cebongan, Selasa (8/6). "Harus diakui, realisasi penyaluran anggaran penanganan Covid-19 masih sangat rendah. Hingga bulan Mei ini, baru tersalur sekitar Rp 17,5 miliar dari total alokasi anggaran sebesar Rp 133,764 miliar," ungkapnya.

Lebih jauh dijelaskan Haris, alokasi anggaran penanganan Covid-19 Kabupaten Sleman tahun 2021 setelah refo-

cusing mencapai Rp 133.764.494.451. Anggaran itu digunakan untuk bidang kesehatan total sebesar Rp 92.942.459.692. Anggaran ini digunakan untuk penanganan Covid sebesar Rp 56.824.427.079 dan untuk dukungan program vaksinasi sekitar Rp 36.118.032.613.

"Sebagian anggaran lainnya atau sekitar 30.256.455.959 dialokasikan untuk penanganan dampak atau dukungan ekonomi. Kemudian sisanya atau Rp 10.565.578.800 untuk bantuan sosial semisal pemberian jadup atau jaring pengaman sosial (JPS)," beber Haris.

Dikatakan pula, realisasi penyaluran anggaran yang sampai saat ini masih rendah lebih dikarenakan belum ada juklak dan juknis yang pasti dari pemerintah pusat. Misalnya juklak juknis untuk pemberian insentif tenaga kesehatan termasuk vaksinator. "Kami memang harus hati-hati dan tidak berani mengeluarkan SPJ sebelum jelas pedoman aturannya," jelas Aji.

Namun secara prinsip, penanganan Covid-19 di Sleman tetap berjalan sebagaimana mestinya. Meski insentif belum bisa cair, petugas kesehatan tetap bekerja normal karena ini hanya menyangkut teknis pencairan. "Anggarannya jelas ada kok. Apalagi pengalokasian anggaran penanganan Covid di tahun 2021 ini lebih terencana dibanding tahun 2020," tandas Aji. (Has)-f

RSJ GRHASIA

Wujudkan Kesehatan Jiwa Paripurna

PAKEM (KR) - Sebagai satu-satunya Rumah Sakit Jiwa (RSJ) milik Pemda DIY, RSJ Grhasia bertugas membantu Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, khususnya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif serta kesehatan lainnya. Sebagai RSJ Kelas A, RS Grhasia dengan kekhulusannya juga mengembangkan layanan kesehatan lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Direktur RSJ Grhasia dr Akhmad Akhadi S MPH saat Forum Konsultasi Publik (FKP), Selasa (8/6) yang dilaksanakan secara daring/zoom. Didampingi Kepala Bidang Pelayanan Medik drg Ririn Puspandari MKes, dr Akhmad menyebutkan, FKP untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan Standar Pelayanan dari pemangku kepentingan dan masyarakat. "Sesuai visi Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza Paripurna yang Berkualitas dan Beretika," tegasnya.

Zoom meeting diikuti praktisi, stake-

holder, organisasi masyarakat sipil, pengguna layanan, tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha. Hadir juga Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY drg Yuli Kusumastuti Iswandi Putri MKes.

"Visi juga disertai misi mewujudkan RS sebagai pusat pembelajaran, penelitian dan pengembangan kesehatan jiwa dan Napza, pelayanan yang berkualitas menjamin keselamatan pasien, serta pelayanan beretika mencerminkan budaya masyarakat DIY," jelasnya.

Disebutkan jenis layanan RS meliputi Gawat Darurat (Psikiatri, Umum, Ambulans), kemudian Rawat Jalan (psikiatri/jiwa, Psikologi Klinik, Keperawatan Jiwa, KIR Jasmani, Gigi dan Mulut, Syaraf, Anak Tumbuh Kembang, Penyakit Dalam, instalasi Rawat Intensif-Inap Psikiatri, Penanganan Korban Napza, Rehabilitasi Medik, Rehabilitasi Mental, Rekam Medik, dan PKRS dan Keswamas. "Dengan ditunjang instalasi laboratorium, radiologi, farmasi, Gizi dan lainnya," terang dr Akhmad. (Vin)-f



KR-Juvintarto

dr Akhmad Akhadi S MPH didampingi drg Ririn Puspandari MKes dan jajarannya saat Forum Konsultasi Publik (FKP) secara daring/zoom.

DPRD KABUPATEN SLEMAN

SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274)868413, Fax (0274)868413

KINERJA KOMISI B DPRD KABUPATEN SLEMAN

Mendorong Masyarakat Berdikari Melalui UMKM

SLEMAN (KR) - Situasi pandemi seperti sekarang memang mendorong adanya perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Salah satunya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus menyesuaikan perkembangan zaman agar tetap eksis. Untuk itu, Komisi B DPRD Kabupaten Sleman mendorong kepada Dinas Koperasi dan UMKM banyak mengadakan workshop, bimtek dan pelatihan di bidang digital marketing.

Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Sleman Rahayu Widi Chahyani SH MM mengatakan, selama pandemi ini, UMKM penunjang pariwisata sangat terdampak, terutama yang berjualan di tempat pariwisata. Hal itu dikarenakan wisatawan yang datang ke objek wisata berkurang.

"Aktivitas masyarakat masih dibatasi. Tentu orang yang bepergian untuk berwisata menjadi berkurang. Sementara UMKM yang bergantung dari pariwisata

cukup banyak," kata Rahayu di Sleman, Selasa (8/6).

Tak heran, lanjut perempuan yang kerap dipanggil Yuyun, bahwa banyak toko milik UMKM yang berjualan secara konvensional gulung tikar. Hal itu dikarenakan masyarakat yang datang untuk berbelanja berkurang.

"Misalnya toko oleh-oleh, souvenir yang berjualan secara konvensional tentu akan meredup. Soalnya wisatawan yang datang berkurang. Dalam satu sisi, konsumen mereka mayoritas dari wisatawan luar daerah," ucap politisi dari PKB ini.

Menurutnya, pandemi Covid-19 memang ada positif dan negatif bagi pelaku UMKM. Dari sisi positifnya, para pelaku UMKM dipaksa untuk berjualan atau memasarkan produknya secara online. Namun sisi negatifnya, jika tidak mau beradaptasi dengan tek-



KR-Istimewa

Rahayu Widi Chahyani

nologi, akan kalah bersaing.

"Dengan pembatasan kegiatan, otomatis masyarakat malas keluar. Untuk memenuhi kebutuhannya, mereka bisa belanja secara online. Makanya pandemi ini sedikit memaksa untuk beradaptasi dengan teknologi supaya bisa memasarkan produknya secara online," tuturnya.

Untuk itu, Komisi B DPRD

Kabupaten Sleman mendorong Dinas Koperasi dan UMKM supaya memperbanyak kegiatan workshop, bimtek dan pelatihan-pelatihan di bidang digital marketing. Tujuannya untuk menambah wawasan dan skill dari para pelaku UMKM.

"Era sekarang ini serba digital. Kami mendorong UMKM ini juga menyesuaikan perkembangan zaman. Salah satunya mereka juga harus bisa berjualan secara online agar jangkauan pasarnya lebih luas. Tapi kalau berjualan secara konvensional, pasarnya hanya orang yang mau datang saja," tambah Yuyun.

Di samping membina UMKM yang sudah ada, program kegiatan itu juga untuk memfasilitasi warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan harapan masyarakat yang kehilangan pekerjaan dapat memulai usaha. Apalagi Sleman telah mempunyai Pusat

Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan toko online Sleman Mart yang dapat membantu memasarkan produk UMKM.

"PLUT dan Sleman Mart selama ini sudah bagus perannya dalam membantu memasarkan produk UMKM. Jadi bagi masyarakat yang baru mulai usaha tak perlu takut untuk memasarkan karena dapat difasilitasi PLUT dan Sleman Mart," tambahnya.

Dengan banyak masyarakat yang mau menjadi pelaku UMKM dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu masyarakat Sleman bisa berdikari melalui UMKM. "Kami punya impian, masyarakat Sleman itu berdikari melalui UMKM. Makanya Komisi B sangat konsen terhadap peningkatan UMKM agar mampu bersaing dalam segala situasi," pungkasnya. (Sni)-f



KR-Istimewa

Komisi B saat mengunjungi pelaku UMKM.



KR-Istimewa

Rahayu dan Sukanto melihat produk UMKM Sleman.